

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku- Buku

- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, 1983, *Fockema Andreae's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, A. Teloeke, dan H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, ST. Paulus Min West Publishing Co, USA.
- Ernawati, Widi Dwi, 2018, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Polinema Press, Malang.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Fatimah, Euis, 2011, *Buku Panduan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Fidel, 2010, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Muria Kencana, Jakarta.f
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.162.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- HR, Ridwan 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta

- Lotulung, Pulus Efendie, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marbun, SF., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta.
- Nazir, Moh., 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor.
- Pandiangan, Liberty, 2014, *Administrasi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2019 *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2011, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Salman, Kautsar Riza dan Heru Tjakara, 2019, *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*, Indeks, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.19, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly , 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan, Thomas, 2017, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*, Indeks, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2019, *Hukum Pajak*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutopo, H.B., 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.

Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Universitas Parahyangan, Bandung.

Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta,

Waluyo, Bambang, 2010, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi

Isnaini, Reza, 2018, "*Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Senapelan, Pekanbaru*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Rosela, 2021, "*Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Woro K, Oktarianti Widya, 2017, "*Kedudukan dan Kewenangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*", Skripsi Sarjana Universitas Pasundan, Bandung.

C. Jurnal

Bawazier, Fuad, "*Reformasi Pajak di Indonesia*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1, 2011.

Bestari, Lega "*Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, Kemudahan Dalam Perpajakan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*", Jurnal Jom. Fekon Vol. 2 No. 1, 2015.

Darmayasa, I Gede dan Putu Ery Setiawan, "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*", E-Jurnal Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14 No. 1, 2016.

Kartikasari, Agnes Devi, "*Pengaruh Compliance Cost Dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Self Aessment System (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang)*", Jurnal Skripsi Sarjana Universitas Komputer Indonesia, 2017.

Rokhim, Abdul, “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Vol. 19 No. 36, 2013.

Sihombing Poltak, dan Jonson Rajagukguk, “Paradigma Good Government Dan Digital Society Dari Perspektif Single Identity Number (SIN)”, Jurnal VISI Vol. 21 No.3, 2013,

Widianto, Rio “Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)”, Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 9 No. 1, 2019.

Yusnidar, Amrizal, dan Mukhlis, ” Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Antara Peraturan Perundang-Undangan Dosen Dengan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

D. Internet

Amaranggana, “Mengulik Reformasi Pajak Jilid IIP”, tersedia di <https://www.pajakku.com/read/61939d9a4c0e791c3760bfdc/Mengulik-Reformasi-Pajak-Jilid-III>, dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 01.47 WIB.

Annur, Cindy Mutia, “Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022”, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022#:~:text=Pada%20pertengahan%202020%2C%20jumlah%20penduduk,juta%20jiwa%20hingga%20pertengahan%202022>, dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 00.30 WIB.

Ardin, Galih, “Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP”, tersedia di <https://news.detik.com/kolom/d-5821616/mencermati-rencana-integrasi-nik-dan-npwp>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 19.07 WIB.

Ayuwuragil, Kustin, “Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi”, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/kominfo-akui-pencurian-nik-dan-kk-saat-registrasi-kartu-sim>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, 2021, “Hasil Sensus Penduduk 2020” (On-Line), tersedia di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2022 Pukul 20.03 WIB.

-----, “Siaran Pers Badan Pusat Statistik (BPS) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2021” (On-Line), tersedia di <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 20.03 WIB.

Bestari, Novina Putri, “Bahaya Mengintai Usai 279 Juta Data warga RI Dilaporkan Bocor”, tersedia di <https://www.suara.com/news/2020/05/22/075531/23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-pakar-bisa-dipastikan-bocor-dari-kpu>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 09.10 WIB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, 2021, “Kinerja APBN s.d. 31 Oktober 2024 Provinsi Sumatera Barat” (On-Line), tersedia di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/berita/pengumuman/3091-kinerja-apbn-s-d-31-oktober-2024-provinsi-sumatera-barat.html>, dikunjungi pada tanggal 25 April 2025 Pukul 20.03 WIB.

Harsono, Fitri Haryanti, “Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran 6 Juta Data Pasien COVID-19”, tersedia di <https://www.liputan6.com/health/read/4853232/kemenkes-telusuri->

[dugaan-kebocoran-6-juta-data-pasien-covid-19](#), dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 02.10 WIB.

Heriani, Fitri Novia “ *DJP Dukcapil Teken MoU Terkait Integrasi Data Kependudukan dengan Perpajakan*”, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/djp-dukcapil-teken-mou-terkait-integrasi-data-kependudukan-dengan-perpajakan-lt62875b85be4d7/>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.33 WIB.

Kementerian Keuangan, 2021, “*Melalui UU HPP Pemerintah Akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan*” (On-Line), tersedia di <https://setkab.go.id/menkeu-uu-hpp-upaya-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/>, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2021.

Khairizka, Putri Novani, “*Integrasi NIK jadi NPWP, WP Diimbau Lakukan Validasi di DJP Online*”, tersedia di <https://news.ddtc.co.id/integrasi-nik-jadi-npwp-wp-diimbau-lakukan-validasi-di-djp-online>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 20.05 WIB.

Kurniati, Dian, “*Integrasi NIK jadi NPWP, WP Diimbau Lakukan Validasi di DJP Online*”, tersedia di <https://news.ddtc.co.id/integrasi-nik-jadi-npwp-wp-diimbau-lakukan-validasi-di-djp-online>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 20.05 WIB.

Kusnandar, Viva Budy, “*Berapa Jumlah Angkatan Kerja Indonesia 2022?*”, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/berapa-jumlah-angkatan-kerja-indonesia-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,berjumlah%20208%2C54%20juta%20jiwa>, dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 02.08 WIB.

Pangastuti, Triyan, “*Ini Alasan Pemerintah Integrasikan NIK Jadi NPWP di KTP*”, tersedia di <https://www.beritasatu.com/ekonomi/837983/ini-alasan-pemerintah-integrasikan-nik-jadi-npwp-di-ktp>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 16.33 WIB.

Rendy, Adrikni Sadikin dan Intan Ruhaeni, “*2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Pakar: Bisa Dipastikan Bocor dari KPU*”, tersedia di <https://www.suara.com/news/2020/05/22/075531/23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-pakar-bisa-dipastikan-bocor-dari-kpu>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 09.05 WIB.

Rezgisari, Indira, “*Pembobolan Rekening Ilham Bintang Berawal dari Bocornya Data*”, tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/q57zdg328/pembobolan-rekening-ilham-bintang-berawal-dari-bocornya-data>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 08.00 WIB.

Said, Abdul Azis “ *Integrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023*”, tersedia di

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62e8f44f9fa19/integrasi-nik-npwp-lama-masih-berlaku-hingga-akhir-2023>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 19.14 WIB.

Santia, Tira, “UU HPP Disahkan, Kemenkeu Proyeksi Rasio Pajak 2022 Naik Jadi 9 Persen”, tersedia di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4687196/uu-hpp-disahkan-kemenkeu-proyeksi-rasio-pajak-2022-naik-jadi-9-persen>, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 01.47 WIB.

Wahyudi, Eko, “NIK jadi NPWP, Pemilik KTP Otomatis Jadi Wajib Pajak?”, tersedia di <https://www.fortuneidn.com/finance/eko-wahyudi/kebijakan-nik-jadi-npwp-tak-otomatis-mengenakan-pajak>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 08.08 WIB.

